

KOLABORASI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DESA KARANGSONG

KARLINA¹, SLAMET USMAN ISMANTO², Rd AHMAD BUCHORI³

^{1,2,3}Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

pratamap850@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is due to the interest of writers to know the implementation of collaboration in the development of the Minapolitan area of capture fisheries in Karangsong village. Preliminary observation shows that collaboration in the development of the Minapolitan area of capture fisheries in Karangsong District Indramayu has not been well. The method used is a descriptive method with a qualitative approach with reference to the collaboration theory of Huxham and Vangen (1996) which suggests 6 dimensions for collaboration to run properly. From this research, it can be concluded that the dimensions of good collaboration implementation have not been able to be fulfilled by the parties involved in the development of the Minapolitan area of capture fisheries of Karangsong village. In order to collaborate on the development of the Minapolitan area of capture fisheries the village of Karangsong is well needed to improve in various aspects, including improving communication between the parties involved as well as Make improvements in terms of development and development infrastructure support Minapolitan capture fisheries. In addition, in order to make this collaboration can be required to have the existence of SOP development mechanism and development of the Village capture Fisheries Karangsong Indramayu Village.

Keywords: *collaboration, development, minapolitan, fish landing base, Karangsong Village*

COLLABORATION IN THE DEVELOPMENT OF THE MINAPOLITAN CAPTURE FISHERIES AREA, KARANGSONG VILLAGE, INDRAMAYU REGENCY

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah karena ketertarikan penulis untuk mengetahui pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Desa Karangsong. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong Kabupaten Indramayu belum berjalan dengan baik. Metode yang digunakan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada teori kolaborasi dari Huxham dan Vangen (1996) yang mengemukakan 6 dimensi agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dimensi pelaksanaan kolaborasi yang baik belum mampu dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong. Agar kolaborasi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong dapat berjalan dengan baik diperlukan peningkatan dalam berbagai aspek yaitu diantaranya meningkatkan komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dan juga melakukan peningkatan dalam hal pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana penunjang minapolitan perikanan tangkap. Selain itu agar kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya SOP Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Tangkap Desa Karangsong Kabupaten Indramayu.

Kata kunci: kolaborasi, pengembangan, minapolitan, perikanan tangkap Desa Karangsong.

PENDAHULUAN

Dalam mendorong pembangunan dalam sektor perikanan dan kelautan maka perlu dikembangkan kawasan minapolitan seperti yang tertuang dalam PERMENKP NO. PER 12/ men/ 2010/ Tentang Minapolitan. Kawasan Minapolitan adalah suatu

konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Kebijakan pengembangan kawasan minapolitan merupakan salah satu kebijakan yang membutuhkan kajian kolaborasi *governance*. Hal tersebut dikarenakan

dalam menjalankan tugasnya, seringkali organisasi memerlukan bantuan atau kerjasama dengan organisasi lainnya yang mencakup swasta dan juga masyarakat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, dan adanya sinergitas dari berbagai pihak-pihak yang terlibat.

Kabupaten Indramayu memiliki wilayah perairan pantai sepanjang 147 km dan luas perairan sekitar 70.000 ha serta memiliki potensi usaha penangkapan ikan di laut yang cukup besar dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Kehidupan masyarakat Indramayu yang sebagian besar mendiami wilayah pesisir pantai sehingga mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kontribusi nelayan Indramayu sangat berpengaruh besar terhadap produksi perikanan tangkap di Jawa Barat dan merupakan daerah dengan tingkat kontribusi produksi perikanan terbesar diantara daerah-daerah lainnya di wilayah Pesisir Provinsi Jawa Barat di bagian utara.

Potensi terbesar perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu berada di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karangsong memiliki potensi TPI besar yang menjadi andalan perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Karangsong merupakan PPI yang menghasilkan produksi pelelangan ikan terbesar di Jawa Barat dengan didukung oleh sumber daya nelayan sebanyak 6.668 orang yang mampu mengoperasikan perahu/kapal perikanan tangkap sebanyak 1.224 buah.

Penetapan PPI Karangsong Indramayu sebagai lokasi minapolitan berbasis perikanan tangkap diperkuat oleh Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 523/Kep.24-Diskanla/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu dan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 523.1.05/Kep.53.A-Diskanla/2013 tentang Penetapan Kawasan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan di Kabupaten Indramayu. Pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan di Indramayu sudah dilaksanakan dari tahun 2012 dan dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum optimal dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala salah satunya adalah Kinerja Tim POKJA Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Kabupaten Indramayu yang masih belum maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Kasubid Perencanaan Dinas Perikanan dan Kelautan dan Pengurus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong (KPL Mina Sumitra) sudah merencanakan konsep untuk pembangunan TPI di tepi pantai yang tentunya penambahan TPI akan meningkatkan produksi perikanan di Karangsong. Namun, melihat kondisi lapangan sekarang lahan di tepi pantai justru digunakan oleh Disbudpar untuk membangun fasilitas pariwisata tanpa adanya sosialisasi atau konfirmasi kepada Diskanla atau

pihak-pihak yang terlibat. Kedua, masih kurang kuatnya komunikasi antara perencana dengan pembuat kebijakan lintas sektoral dan juga masyarakat nelayan, yaitu ditandai dengan kurang adanya komunikasi yang dilakukan secara intensif (rapat) sehingga program kerja yang ada kurang dapat dipahami secara mendalam oleh pihak-pihak yang terlibat, perumusan rencana aksi walaupun telah dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan dalam 1 (satu) tahun pertama yaitu tahun 2011 diperoleh data surat sebanyak 5 buah dan rapat sebanyak 4 kali. Sedangkan perkembangan tahun berikutnya baik surat maupun rapat dilakukan tidak lebih dari 5 kali per tahun. Ketiga, masih lemahnya komitmen dan konsistensi dari pihak yang terlibat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya SOP Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Tangkap Desa Karangsong Kabupaten Indramayu yang mengakibatkan mekanisme kerja Tim POKJA Minapolitan Kabupaten Indramayu tidak mempunyai pegangan yang terarah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini penulis harus melakukan wawancara yang mendalam dalam menganalisis fenomena dan masalah yang penulis temukan. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. (Moleong, 2014: 4). Dalam penelitian ini selain melakukan penelitian dengan melakukan wawancara mendalam yang kemudian menghasilkan data deskriptif, penulis juga melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang penulis akan teliti yaitu tentang kolaborasi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong Kabupaten Indramayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori yang menjadi acuan dalam penelitian yang penulis lakukan, kolaborasi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila memenuhi 6 dimensi kolaborasi yang dikemukakan oleh Huxham dan Vangen (1996), yaitu :

1. *Managing Aims* (Tujuan Bersama)

Kolaborasi pada hakekatnya adalah suatu kerjasama. Kolaborasi dapat berlangsung di dalam organisasi ataupun diluar organisasi dengan melibatkan beberapa organisasi tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan. Tujuan merupakan alasan utama dilakukannya kolaborasi. Tujuan bersama akan sulit dicapai apabila dilakukan secara mandiri.

Peranan *managing aims* dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong Kabupaten Indramayu sangatlah penting untuk dilakukan, karena setiap instansi yang terlibat memiliki suatu tujuan bersama. Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa *managing aims*, tidak hanya proses untuk mencapai tujuan bersama saja namun yang paling penting adalah dalam *managing aims* tersebut terdapat makna yang harus dipahami terlebih dahulu. Diantara tujuan dari dilakukannya pengembangan kawasan minapolitan ini adalah untuk meningkatkan produksi perikanan, produktivitas dan kualitas produk hasil perikanan dan kelautan, meningkatkan pendapatan nelayan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong yang tercantum dalam dokumen *Master Plan* Tahun 2015 Tentang Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu, yaitu bertujuan untuk memajukan fungsi pelabuhan baik secara pembangunan fisik maupun secara pembangunan SDM.

Tujuan dari dilakukannya pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong merupakan hal yang sangat penting dan harus dapat dipahami secara objektif oleh semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini. Hal ini tentunya bertujuan agar masing-masing pihak dapat mengambil peran serta mempunyai tupoksi dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsi pengelolaan kawasan minapolitan.

Pada dasarnya, semua pihak yang terlibat sepakat dan tahu dengan tujuan dari dilakukannya pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong. Seperti yang tertuang dalam dokumen *Master Plan* dalam Pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Desa Karangsong mencerminkan keinginan yang sangat besar untuk memajukan fungsi pelabuhan. Baik pembangunan fisik maupun pembangunan SDM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan tersebut menggambarkan bahwa dicitakan hendak menjadi pelabuhan yang besar.

Namun dilapangan, penulis melihat Pangkalan Pendaratan Ikan di Karangsong masih jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya dari faktor perbedaan persepsi dan faktor anggaran. Pembangunan kawasan minapolitan di

Karangsong yang telah dilakukan masih kurang tertata atau terprogram dengan baik. Penganggaran yang dialokasikan untuk pembangunan PPI Karangsong belum mencerminkan keberhasilan pembangunan minapolitan secara komprehensif, sebagai indikatornya adalah produksi ikan yang didaratkan di TPI Karangsong mengalami penurunan pada tahun 2017.

Pembangunan yang telah dilakukan tersebut merupakan pembangunan yang belum mencerminkan perencanaan yang tertuang dalam *Master Plan* minapolitan perikanan tangkap PPI Karangsong. Hal ini dikarenakan baru sebagian kecil dari *grand design* rencana pembangunan kawasan PPI Karangsong yang terealisasi.

Gambar 4.1
Akses Jalan Menuju TPI Karangsong



(Sumber : Data Peneliti, 2019)

Berdasarkan pada gambar 4.1 merupakan gambar akses jalan menuju TPI Karangsong. Jalan komplek kawasan PPI Karangsong saat ini sudah dibangun dalam konstruksi cor beton yang dibangun tahun 2011 melalui dana bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat. Kondisinya masih baik dan layak digunakan sebagai prasarana transportasi lalu lalang kendaraan, baik untuk kepentingan angkutan ikan maupun kendaraan umum. Namun, jalan menuju pasar dan TPI Karangsong masih kurang lebar untuk akses kendaraan keluar masuk, hal itu akibat dari penuhnya bahu jalan sebelah kiri oleh pembuatan kapal.

Gambar 4.2

Kondisi TPI Karangsong



(Sumber : Data Peneliti, 2019)

Luas lahan kawasan TPI Karangsong adalah 5.600 m². Fasilitas di sekitar TPI Karangsong adalah kantor administrasi TPI, Kios Bahan dan Alat Penangkapan (Kios BAP), lahan parkir, prasarana dan sarana komunikasi radio, prasarana dan sarana pengepakan ikan, depot es, Pos Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta Wilayah Kerja Karangsong, Pos Syahbandar Perikanan, dermaga bongkar muat, pos jaga, instalasi air bersih dan kantor kas bank.

Kapasitas daya tampung lantai lelang di TPI yang ada saat ini sudah tidak memadai mengingat jumlah volume ikan yang didaratkan dan dilelang di TPI Karangsong sangat besar yaitu 70-90 ton per hari. Oleh karena itu diperlukan perluasan TPI. Namun mengingat kondisi lahan di sekitarnya terdiri dari pemukiman penduduk dengan status lahan milik, maka pengembangan berupa perluasan TPI di lokasi tersebut sangat berat dan relatif tidak memungkinkan. Oleh karena itu pengembangan TPI, memerlukan lahan lain yang lebih luas.

Pembangunan dan pengembangan kawasan PPI Karangsong, terutama Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan segala fasilitas kelengkapannya merupakan aspek penting karena memiliki peran strategis terutama guna menunjang perekonomian masyarakat. TPI merupakan prasarana utama untuk menjalankan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Pembangunan sarana prasarana pelabuhan dimaksudkan agar kapasitas PPI Karangsong dapat menampung dan melayani bertambahnya kapal nelayan berukuran besar (> 30 GT) dari tahun ke tahun, maka Pemerintah dituntut agar dapat menyediakan fasilitas yang representatif sebagai pelayanan prima kepada nelayan.

Pada dasarnya tujuan semua pihak-pihak yang terkait sudah memiliki kesamaan, fungsi dan tugas sudah saling mengerti dan dalam pembuatan perencanaan atau *Master Plan* sudah melibatkan semua pihak terkait, namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala (hambatan) yang membuat pelaksanaan kolaborasi ini belum bisa berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan belum bisa memenuhi tujuan yang diinginkan

bersama yaitu memajukan fungsi pelabuhan baik secara pembangunan fisik maupun pembangunan SDM di Desa Karangsong.

2. *Compromise* (Kompromi)

Kompromi merupakan cara yang digunakan untuk mengatasi perbedaan cara kerja, gaya kerja individu, norma dan nilai organisasi yang dibawa serta oleh masing-masing organisasi guna menemukan kultur, gaya kerja, nilai dan norma bersama. Kompromi terjadi saat ada dua hal yang berbeda, lalu dilakukan suatu tindakan-tindakan yang nantinya akan menghasilkan suatu kesepakatan atau persetujuan. Kompromi dalam proses kolaborasi digunakan untuk mengatasi perbedaan cara kerja, kultur, gaya kerja individu, norma, dan juga nilai dalam organisasi yang dibawa serta oleh masing-masing organisasi yang melakukan kolaborasi guna menemukan gaya kerja, nilai dan norma bersama.

Hal itu tentu saja sulit untuk diwujudkan karena untuk membentuk kultur atau budaya kerja bersama membutuhkan proses dan juga waktu yang lama. Dibutuhkan rasa saling menghargai satu sama lain antar pihak yang terkait dalam melakukan kolaborasi. Perbedaan-perbedaan yang dibawa masing-masing organisasi tak jarang menimbulkan masalah dikemudian hari. Namun sebagai pihak yang sepakat untuk melakukan kolaborasi masalah-masalah yang dihadapi harus dapat disikapi dan ditindaklanjuti dengan baik. Kompromi bisa dilakukan melalui kegiatan rapat baik secara formal maupun non-formal yang harus diterapkan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak terkait.

Oleh karena itu, kompromi dalam hal ini sangat berperan penting dalam setiap pelaksanaan suatu kegiatan. Sama halnya dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong ini, walaupun masing-masing pihak memiliki kultur kerja yang berbeda. Mengkompromikan semua perbedaan yang ada menjadi sangat penting karena akan melibatkan semua sumber daya dan hasil akhirnya akan menjadi kepemilikan bersama. Sehingga dengan adanya tujuan bersama meskipun setiap pihak yang terkait memiliki wilayah kerja dan budaya kerja yang berbeda-beda namun tidak mempengaruhi dalam suatu pencapaian tujuan bersama.

Akan tetapi keadaan di lapangan belum sesuai yang diharapkan seperti kondisi yang disebutkan diatas. Dalam proses kolaborasi pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong ini menimbulkan beberapa permasalahan. Penulis menyimpulkan bahwa proses kompromi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong sudah dilakukan walaupun belum secara optimal. Hal ini terlihat dari kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kawasan minapolitan perikanan

tangkap Desa Karangsong masih belum tertata dengan baik, karena masih terdapat perilaku pihak-pihak yang terlibat yang masih cenderung kumuh dan kurang peduli akan kebersihan lingkungannya. Hal ini terjadi karena belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu kepada masyarakat nelayan Karangsong sehingga masih ada masyarakat nelayan karangsong yang masih belum memahami terkait pengembangan minapolitan ini. Untuk mengatasi hal ini, semua pihak yang terlibat, mulai menanamkan rasa saling pengertian satu sama lain, melakukan berbagai pendekatan internal berbicara dari hati ke hati terutama kepada masyarakat nelayan Karangsong.

3. *Communication (Komunikasi)*

Aspek dimensi yang ketiga dalam pelaksanaan kolaborasi yaitu komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu aspek yang penting guna memberikan arahan, penyampaian tujuan, dan juga untuk meredam berbagai permasalahan yang muncul. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung kebutuhan dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut.

Di dalam komunikasi terjadi interaksi sosial yang melibatkan banyak komponen, sehingga komunikasi memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas kehidupan. Selain itu, komunikasi juga merupakan upaya untuk mempertemukan antara tujuan organisasi dengan target dan hasil yang ingin dicapai. Komunikasi yang efektif dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman atau makna ganda yang mungkin timbul saat proses kolaborasi berlangsung. Kerjasama yang dilakukan antar organisasi pemerintah dengan organisasi non-pemerintah harus sering mengadakan rapat-rapat atau pertemuan untuk mengambil suatu tindakan bersama yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.

Pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong jelas melibatkan banyak pihak. Selain pemerintah sebagai pembuat kebijakan, ada pihak swasta yang memiliki peran sebagai objek kebijakan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Disamping itu, keterlibatan masyarakat nelayan pun juga berperan sebagai objek dari kebijakan pemerintah. Untuk itu, maka perlu terjalinnya komunikasi diantara pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, pihak KPL Mina Sumitra dan masyarakat nelayan melalui perwakilannya.

Komunikasi yang terjalin diantara pihak-pihak yang terkait sudah dilaksanakan melalui rapat-rapat baik secara formal maupun informal, namun belum dapat dikatakan optimal. dalam pelaksanaan kolaborasi ini ada singgungan-singgungan yang tidak dapat dielakkan. Seperti antara Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Indramayu, singgungan terjadi dimana ketika Dinas Perikanan dan Kelautan telah membuat konsep bahwasanya akan dibuat Tempat Pelelangan Ikan di tepi pantai Pembangunan TPI diharapkan dilakukan di atas tanah timbul yang luas, agar dapat menampung produksi ikan lebih banyak lagi sejalan dengan pertumbuhan kapal perikanan ukuran besar. Pembangunan dan pengembangan TPI sangat memungkinkan apabila dilakukan di tepi Pantai Karangsong dengan luas lahan minimal 3 – 5 Ha. Namun ternyata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan aksi menjadikan pantai sebagai tempat pariwisata dan juga mendirikan bangunan-bangunan yang diperuntukkan untuk informasi dan kegiatan pariwisata tanpa ada komunikasi dahulu dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu.

Komunikasi yang baik tentunya akan membantu jalannya kelancaran setiap kegiatan. Akan tetapi terkadang ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan kurangnya efektifitas komunikasi tersebut, seperti kurangnya keterbukaan antara satu anggota dengan anggota lainnya, atau antara anggota dengan ketua yang tidak menyampaikan kesulitan dalam menjalankan tugasnya atau tidak ada konfirmasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jalannya program kerja, menunda waktu dalam menyampaikan informasi hasil rapat atau tentang kerjasama dalam menjalankan tugas, pemahaman yang salah dalam menangkap informasi, dan kurangnya pendekatan antar pribadi anggota dengan ketua.

Jadi dalam pelaksanaan kolaborasi sebuah komunikasi sangat penting dilakukan dalam sebuah kolaborasi adanya komunikasi yang baik antar pihak sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau singgungan-singgungan antar pihak yang terkait. Namun, berdasarkan informasi dari hasil wawancara penulis dengan para informan diatas, pada dimensi yang ketiga ini hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antar pihak yang terlibat belum berjalan secara efektif. Hal ini didukung dengan masih adanya *miss* atau singgungan-singgungan yang terjadi antara pihak yang terkait dan beda kepentingan. Komunikasi juga dilihat dari diadakannya kegiatan rapat yang dilakukan oleh pihak yang berkolaborasi. Kegiatan rapat yang dilakukan masih kurang, karena intensitas rapat dari tahun ke tahun semakin jarang dan melemah. Seharusnya diadakan jadwal rapat yang pasti, tidak hanya dilakukan pada saat ada masalah saja, ada tidaknya masalah sebaiknya rapat tetap dilakukan agar komunikasi yang dilakukan antar pihak terkait dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kesalahpahaman yang terjadi, dengan komunikasi yang efektif maka proses kompromi antar pihak-pihak yang terlibat pun akan semakin baik.

4. *Democracy and Equality (Demokrasi dan Kesetaraan)*

Demokrasi dan persamaan hak ada karena kolaborasi menyangkut beberapa organisasi. Organisasi dalam kolaborasi biasanya berbeda latar belakang yang juga cara kerjanya pun berbeda-beda. Dan didalam demokrasi, rapat atau musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan demokrasi itu sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa pengambilan keputusan dari setiap permasalahan yang ada dalam pengembangan kawasan minapolitan di Karangsong ini selalu melalui musyawarah atau rapat. Pada dasarnya dalam pelaksanaan kolaborasi ini pihak terlibat sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing dan tidak ada unsur pemaksaan dari pihak-pihak yang lain. Kemudian dalam menentukan keselarasan yang yang diterapkan dalam kolaborasi ini yaitu dengan cara kembali mempedomani dokumen *Master Plan* dalam pengembangan kawasan Minapolitan yang telah disepakati bersama.

5. *Power and Trust (Kekuatan dan Kepercayaan)*

Kekuatan dan kepercayaan pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap pihak atau organisasi yang terlibat. Semua organisasi pada hakekatnya sama. Maka dari itu, kekuatan harus diimbangi dengan kepercayaan. Kekuatan dan kepercayaan dalam kolaborasi merupakan hal yang harus dibangun bersama-sama oleh pihak-pihak yang melakukan kolaborasi melalui hubungan relasi yang baik.

Kekuatan dan kepercayaan harus dimiliki oleh setiap organisasi yang terkait. Kekuatan yang dimaksud adalah setiap organisasi dalam melakukan kolaborasi ini tidak melakukan penekanan kepada organisasi lain. Semua organisasi pada hakekatnya sama, maka dari itu kekuatan harus diimbangi oleh kepercayaan. Pelaksanaan kolaborasi biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, waktu yang lama tersebut timbul karena setiap organisasi pasti akan berbeda pandangan. Ada tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi yang terkadang tidak bisa dikesampingkan. Kemudian kepercayaan juga harus ditumbuhkan karena akan berpengaruh kepada perjalanan pelaksanaan kolaborasi tersebut. Semakin kuat rasa kepercayaan antar organisasi yang terkait, maka akan semakin mudah dalam pelaksanaan kolaborasi ketika menemukan berbagai macam kendala (hambatan).

6. *Determination, Commitmen and Stamina (Penentuan, Komitmen dan Stamina)*

Determination merupakan kata kunci berkaitan dengan seberapa jauh suatu kerjasama secara berkelanjutan, maka dalam *determination* dirumuskan tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi setiap pihak yang terlibat sebagai sebuah adanya kesepakatan bersama. *Commitment* berkaitan dengan keteguhan hati setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. *Stamina* berkaitan dengan keteguhan hati untuk tetap bekerjasama dalam koridor kolaborasi.

Keberhasilan suatu kolaborasi dapat terlihat dari beberapa lama kolaborasi tersebut dapat bertahan. Semakin lama kolaborasi berlangsung maka semakin baik kerjasama yang tercipta antara pihak-pihak yang melakukan kolaborasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan kolaborasi pada dimensi *determination, commitmen and stamina* belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan masih ada pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi yaitu pihak masyarakat yang masih belum mendapatkan manfaat dari pengembangan minapolitan Karangsong secara utuh. Hal ini disebabkan masih banyaknya pembangunan-pembangunan di Kawasan Minapolitan di Desa Karangsong yang masih belum terlaksana. Kemudian dalam hal komitmen dari informasi diatas masih lemahnya dukungan komitmen dari pemerintah terkait pengembangan kawasan minapolitan di Desa Karangsong ini hal ini dibuktikan dengan tidak adanya SOP Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Tangkap di Indramayu mengakibatkan mekanisme kerja Tim POKJA Minapolitan Kabupaten Indramayu tidak mempunyai pegangan yang terarah. Tugas dan peran masing-masing pihak akan lebih dapat dipahami apabila terdapat SOP terkait Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Tangkap di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu. Kemudian peraturan daerah yang berkaitan dengan pembangunan kawasan minapolitan belum pernah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu merupakan wujud lemahnya komitmen. Ketika adanya kesadaran dan keseriusan dalam menjalankan pengembangan kawasan minapolitan di Karangsong dengan ditambah lagi adanya SOP Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Tangkap di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu dan juga Perda terkait Minapolitan di Kabupaten Indramayu maka pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong akan berjalan dengan baik dan hubungan antar pihak-pihak yang terlibat pun akan semakin kuat dan akan terbentuk keharmonisan dan keterpaduan dalam menjalankan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap

Desa Karangsong serta hal itu dapat memudahkan bagi setiap pihak terlibat dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam stamina pun semua pihak-pihak yang terlibat pada dasarnya sudah melakukan tugasnya masing-masing walaupun masih belum bisa dikatakan efektif. Sehingga diharapkan keteguhan hati dari para pihak-pihak yang terlibat untuk tetap bekerjasama dalam pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Desa Karangsong.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan menarik simpulan dari penelitian yang penulis kaji bahwa kolaborasi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong masih belum terlaksana dengan baik sesuai yang dikemukakan pada teori kolaborasi dari Huxham dan Vangen, masih ada kendala-kendala yang membuat pelaksanaan kolaborasi ini belum bisa berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan belum bisa memenuhi tujuan yang diinginkan bersama, proses kompromi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong sudah dilakukan walaupun belum secara optimal. Komunikasi yang terjalin antar pihak yang terlibat belum berjalan secara efektif. Hal ini didukung dengan masih adanya *miss* atau singgungan-singgungan yang terjadi antara pihak yang terkait dan adanya perbedaan kepentingan. Komunikasi juga dilihat dari diadakannya kegiatan rapat yang dilakukan masih oleh pihak yang berkolaborasi. Kegiatan rapat yang dilakukan masih kurang, karena intensitas rapat dari tahun ke tahun semakin jarang dan melemah.

Kemudian dalam hal komitmen, masih lemahnya dukungan komitmen dari pemerintah terkait pengembangan kawasan minapolitan Karangsong ini hal ini dibuktikan dengan tidak adanya SOP Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Tangkap Desa Karangsong Kabupaten Indramayu yang mengakibatkan mekanisme kerja Tim POKJA Minapolitan Kabupaten Indramayu tidak mempunyai pegangan yang terarah. Kemudian peraturan daerah yang berkaitan dengan pembangunan kawasan minapolitan belum pernah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu merupakan wujud lemahnya komitmen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New strategies for local governments*. Washington: Georgetown University Press.
- Huxham, C., & Vangen, S. (1996). *Managing to Collaborate : The theory and practice of collaborative advantage*. London: Routledge.
- Linden, R. (2002). *Working Across Boundaries : Making Collaboration Work in Government and Non profit Organizations*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Handyaningrat, S. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.
- Straus, D. (2002). *How To Make Collaboration Work : Powerful ways to build consensus, solve problems and make decisions*. California: Berret- Koehler Publisher.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research*.
- Arrozaq, D. (n.d.). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo).
- Haq, I. (2018). Kolaborasi Dalam Penanggulangan Balita Gizi Buruk di Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage.
- Marshall, E. (1995). Transforming the way we work: The power of the collaborative workplace. *American Management Association*.

- Mattessich, P., & Monsey, B. (2001). *Collaboration: What Makes It Work. A Review of Research Literature on Factors Influencing Successful Collaboration*. St. Paul: Amherst H. Wilder Foundation.
- Sam'un, M. (2017). Implementasi Kebijakan Pembangunan Minapolitan Perikanan Tangkap PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Karangsong Indramayu.
- Sriwandi, H. (2014). *Kolaborasi Penataan Pasar Dangdeur Rancaekek Kabupaten Bandung*.
- Supriady, H. (2017). Kolaborasi Dalam Penetapan Upah Minimum Kota Bandung Tahun 2016.
- Wicaksono, T. A., Hidayat, Z., & Rostyaningsih, D. (2015). Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya di Rajapurbawa Kabupaten Banjarnegara. *Journal of Public Policy and Management Review*.

Dokumen

- Kepmenkp No.35/2013/Penetapan Kawasan Minapolitan.
- PERMENKP NO. PER 12/ Men/ 2010/ Tentang Minapolitan.
- Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 523.05/Kep.123g-Diskanla/2011 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Indramayu.
- Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 523/Kep.24-Diskanla/2011 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Indramayu.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indramayu.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021.
- Dokumen *Master Plan* Minapolitan Kabupaten Indramayu.
- Dokumen *Master Plan* Kampung Nelayan Modern Kabupaten Indramayu.